BAB V

PEMBAHASAN

1. Pembahasan tentang strategi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Pucungkidul Boyolangu

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa BKM Pujasera mempunyai tiga fokus program "Tri Daya", yakni:

a. Program lingkungan

Dalam program lingkungan, BKM Pujasera telah melakukan kegiatan yang mampu mendukung sarana prasarana di desa Pucungkidul, seperti memasang jalan paving, membuat talut di tepi sungai, serta membangun jembatan yang memudahkan masyarakat untuk menyebrang sehingga mempercepat kegitatan masyarakat untuk bekerja, bersekolah maupun melakukan pekerjaan sehari-hari.

b. Program sosial

Untuk program sosial sendiri sudah cukup banyak program yang dilaksanakan oleh BKM Pujasera yakni seperti memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan, pengadaan pengobatan gratis serta pemberian induk kambing bergulir. Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan sama, yakni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakat Pucungkidul meningkat.

c. Program ekonomi

Pada kegiatan ekonomi terdapat satu program yang memang sampai saat ini masih berjalan lancar, yakni ekonomi bergulir. Dimana masyarakat bisa melakukan pinjam meminjam dana untuk membantu mendapatkan modal demi menunjang usaha mereka dan perekonomian dengan cara menjadi anggota KSM. Syarat untuk menjadi anggota memang tidak mudah, namun pelaksanaannya juga harus sesuai dengan tujual awal yakni modal usaha demi kelangsungan perekonomian masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan tidak hanya terfokus pada sektor ekonomi saja, namun juga faktor lingkungan dan sosial kesehatan juga. Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di desa Pucungkidul cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun belum cukup maksimal, ditandai dengan respon masyarakat yang cukup baik terhadap kinerja BKM karena hasil dari programnya sampai sekarang masih bisa dirasakan manfaatnya.

Seperti yang digambarkan pada tabel indikator di bawah ini:

Tabel 5.1 Keberhasilan Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Penghasilan	Rp 550.000,-	Rp 700.000,-
2	Kondisi MCK	Tembok dari bilik	Tembok bata/ batako
3	Pembiayaan Pendidikan	Relatif	Relatif lebih mudah

4	Pembiayaan Kesehatan	Untuk berobat tidak ada biaya	Ada pengobatan gratis setiap 1 bulan sekali

Seperti yang tergambar pada tabel di atas, sebelum mendapatkan bantuan dari P2KP, keadaan perekonomian Ibu Ponirah merupakan keluarga yang kurang mampu untuk dapat membiayai kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari penghasilan dia sebelum mendapatkan bantuan dari P2KP. Dikarenakan penghasilan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih kurang menyukupi, maka pada saat mendapatkan bantuan modal usaha, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung membuka usaha warung (jual sayuran). Selain itu setalah masukya program P2KP ini, untuk biaya pendidikan maupun kesehatan, Ibu Ponirah merasakan relatif lebih mudah dari sebelumnya.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Bapak Agung, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Keberhasilan Ekonomi dan Pembangunan

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Penghasilan	Rp 650.000,-	Rp 900.000,-
2	Kondisi rumah	Dinding retak	Dinding lebih kuat
3	Pembiayaan Pendidikan	Relatif	Relatif lebih mudah
4	Pembiayaan Kesehatan	Relatif	Relatif lebih mudah

Sebelumnya dia berpenghasilan sebulan rata-rata Rp 650.000,- itu juga untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi setelah mendapat bantuan kambing bergulir dari P2KP, dia dapat mendapatkan penghasilan lebih karena dengan memelihara kambing tersebut yang kemudian berkembang menjadi banyak maka kambing tersebut bisa dijual dan menambah penghasilannya. Dan dari penghasilan tersebut dia juga bisa memperbaiki tembok rumahnya.

Hal ini sesuai dengan tolok ukur kesejahteraan menurut Human Development Index (HDI) atau yang sering disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Hakim Abdul, bahwa HDI meringkas tiga variabel kesejahteraan dalam sebuah indeks komposit tunggal. Variabel-variabel tersebut antara lain: umur panjang serta menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), pendidikan (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan antara penghasilan dan kesejahteraan.[103]

[103]Hakim Abdul, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 53

2. Pembahasan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BKM Pujasera, peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. faktor tersebut antara lain:

a. Faktor pendukung

1) Program Lingkungan

Adanya kesadaran masyarakat yang secara berswadaya membantu pelaksanaan kegiatan dari program lingkungan, baik materi maupun non materi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai rasa saling membantu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Combs dan Ahmed bahwa dalam pembangunan pedesaan dengan menggunakan pendekatan swadaya masyarakat diperlukan perombakan yang mendasar mengenai seluruh lembaga, proses dan hubungan yang terdapat di daerah pedesaan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan.[104]

2) Program Sosial

Adanya dukunan dari aparat desa maupun pihak BKM dalam menunjang pelaksanaan program dengan cara berusaha bekerjasama dengan dinas-dinas

[104] Philip H dan Ahmed, Manzoor Combs, *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal*, diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIIS), (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 105.

Tulungagung. Hal ini sesuai dengan pemikiran Moeljarto sebagaimana dikutip oleh Taurusman Situmeang, bahwa sosok birokrasi yang tepat bagi pembangunan masyarakat miskin adalah birokrasi yang dapat menjalankan fungsinys sebagai empowering. Yaitu birokrasi yang mampu menciptakan suatu iklim sedemikian rupa sehingga anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan berbagai potensinya secara maksimal. Oleh karena itu, perilaku birokrasi yang dipersyaratkan bagi pencapaian keberhasilan tujuan pembangunan pengentasan kemiskinan adalah perilaku birokrasi yang kondusif dan adaptif terhadap tumbuhnya aspirasi masyarakat miskin tersebut.[105]

3) Program Ekonomi

Adanya respon dan antusias yang cukup baik dari masyarakat untuk mengikuti program dengan cara mendaftar sebagai anggotanya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki pola pikir yang maju dan mau berubah menjadi lebih baik lagi.

b. Faktor penghambat

1) Program Lingkungan

Pihak BKM atau pihak lain yang terkait kurang tranparansi dalam memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan program, karena kegiatan dilakukan secara bergantian sesuai skala prioritas yang dintentukan saat rapat kerja.

[105] Taurusman Situmeang, "Proyek Penanggulangan Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Perkotaan", *Jurnal Reformasi*, Volume3, Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm. 56.

2) Program Sosial

Kurangnya tanggungjawab dari peserta penerima bantuan dari program sosial sehingga program yang seharusnya bejalan dan mampu membantu masyarakat menjadi terhambat karena ulah masyarakat itu sendiri.

3) Program Ekonomi

Kurangnya tanggungjawab anggota ekonomi bergulir, yang seharusnya bisa membantu perekonomian ke depannya terhambat karena ulah anggota yang menyalahi tujuan awal pemberian pinjaman untuk modal usaha namun digunakan untuk konsumtif.

Kurangnya transparansi dan tanggungjawab (akuntabilitas) di atas menyebabkan suatu program/ pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat dan berakibat buruk. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Maryeta Ernesta Ndiki, bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good goveemence). Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pelayanan yang kurang tranparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraannya.[106]

[106] Maryeta Ernesta Ndiki, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Mewujudkan Pelayanan Prima", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 39

3. Tinjauan tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dari Perspektif Islam

Bila kita melihat ke dalam, prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam P2KP sudah sangatlah baik. Dimana menganut kebutuhan hak dasar di dalam masyarakat miskin dan berpihak pada kepentingan masyarakat miskin itu sendiri.

Dapat kita lihat berdasarkan tabel indikator kesejahteraan di atas, bahwasanya upaya dari P2KP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hasilnya sesuai dengan indikator kesejahteraan menurut Islam, yakni menghilangkan lapar. Menghilangkan lapar disini bermakna bahwa rizki uang diberikan Allah kepada setiap ummatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu, kelompok atau orang-orang tertentu saja.[107] Hal ini ditandai dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari P2KP untuk masyarakat yang kurang mampu yang memang menjadi sasaran P2KP agar bisa menopang kehidupannya, dana yang telah disediakan pemerintah digulirkan kepada masyarakat sehingga tidak dikuasai oleh seorang saja. Hal ini juga terbukti cukup berhasil dengan adanya tambahan pengasilan rata-rata perbulannya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Ketika kehidupan masyarakat telah membaik dan penghasilan bertambah berkat adanya membuka usaha dari pinjaman modal tersebut, otomatis kasus kriminalitas misal pencurian yang megindikasikan bahwa masyarakat belum

---

[107] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Bebagai Persoalan Umat,* edisi 2, (Bandunng: Mizan, 2000), hlm. 126-127.

sejahtera pasti berkurang. Dengan demikian suasana menjadi aman dan nyaman. Membuat suasana aman, nyaman dan tenteram (menghilangkan rasa takut) merupakan bagian dari indikator sejahtera dalam Islam yang selanjutnya.